

Demokrasi Indonesia: Dinamika, tantangan dan penguatan demokrasi di era modern

Jaya Kusuma Romadhoni

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: yayaagusuma123@gmail.com

Kata Kunci:

Demokrasi, demokrasi Pancasila, politik identitas, korupsi politik, era modern.

Keywords:

Democracy, Pancasila democracy, identity politics, political corruption, modern era

ABSTRAK

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan negara. Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila yang berlandaskan nilai musyawarah, gotong royong, dan penghormatan terhadap keberagaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan demokrasi di Indonesia, tantangan yang dihadapi, serta upaya penguatan demokrasi di era reformasi dan digitalisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui pengkajian jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, dan sumber ilmiah

lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan demokrasi Indonesia mengalami perubahan dari masa demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga era reformasi yang memberikan ruang lebih luas terhadap kebebasan politik dan partisipasi masyarakat. Namun, demokrasi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti politik uang, korupsi politik, politik identitas, polarisasi sosial, serta rendahnya pendidikan politik masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan politik, penegakan hukum, independensi lembaga demokrasi, literasi digital, dan penguatan nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan demokrasi yang sehat, adil, dan berintegritas.

ABSTRACT

Democracy is a system of government that provides opportunities for citizens to participate in determining state policies. Indonesia implements Pancasila democracy which is based on the values of deliberation, mutual cooperation, and respect for diversity. This study aims to analyze the development of democracy in Indonesia, the challenges it faces, and the efforts to strengthen democracy in the era of reform and digitalization. The research method used is qualitative research with a library research approach through the review of scientific journals, books, academic articles, and other scholarly sources. The results show that the development of democracy in Indonesia has evolved from the parliamentary democracy period, guided democracy, the New Order era, to the reform era which provides greater freedom for political participation and civil liberties. However, Indonesian democracy still faces various challenges such as money politics, political corruption, identity politics, social polarization, and low levels of political education among society. Therefore, strengthening political education, law enforcement, the independence of democratic institutions, digital literacy, and the values of Pancasila is essential to create a healthy, fair, and integrity-based democracy.

Pendahuluan

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan negara. Dalam sistem demokrasi,



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Demokrasi juga menjadi indikator penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, adil, dan menghormati hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menerapkan sistem demokrasi yang dikenal sebagai demokrasi Pancasila yang memiliki ciri khas berupa musyawarah, gotong royong, dan penghormatan terhadap keberagaman masyarakat. Perjalanan demokrasi Indonesia mengalami berbagai perubahan sejak masa kemerdekaan hingga era reformasi (Huda, 2017).

Reformasi tahun 1998 menjadi titik penting dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru, Indonesia mengalami perubahan besar dalam sistem politik seperti kebebasan pers, pemilu yang lebih terbuka, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Namun demikian, demokrasi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti korupsi politik, politik uang, penyebaran hoaks, dan meningkatnya politik identitas dalam kontestasi politik. Selain itu, perkembangan media sosial juga memberikan pengaruh besar terhadap kualitas demokrasi Indonesia. Media sosial mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat, tetapi juga dapat memicu polarisasi sosial akibat penyebaran informasi yang tidak akurat. Oleh karena itu, penguatan demokrasi menjadi hal yang penting untuk menjaga stabilitas politik dan persatuan bangsa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui jurnal ilmiah terbaru yang terindeks Google Scholar, artikel akademik, buku ilmiah, dan repository perguruan tinggi. Teknik analisis data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber yang berkaitan dengan demokrasi Indonesia untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan dan tantangan demokrasi di Indonesia.

Pembahasan

Pengertian Demokrasi dan Demokrasi Pancasila

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat atau atas kehendak rakyat. Dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk menentukan pemimpin dan ikut berpartisipasi dalam proses politik negara (Huda, 2017). Demokrasi yang berkualitas tidak hanya diukur melalui pelaksanaan pemilu, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu menjamin kebebasan sipil, hak politik masyarakat, dan penegakan hukum secara adil.

Dalam konteks Indonesia, demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi Pancasila yang mengutamakan nilai musyawarah, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Demokrasi Pancasila menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis dan

demokratis. Pancasila sebagai ideologi terbuka di era reformasi tetap relevan dalam membimbing praktik demokrasi di Indonesia karena mengandung nilai-nilai luhur yang mampu merespons perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa (Agus, 2016).

Keberagaman Indonesia mulai dari bahasa persatuan yang tetap hidup berdampingan dengan ratusan bahasa daerah, kuliner seperti rendang dan sate yang mendunia, tarian serta lagu tradisional yang khas, peninggalan sejarah seperti Candi Borobudur, hingga simbol kenegaraan seperti Pancasila dan UUD 1945 bukan hanya sekadar kekayaan budaya, tetapi juga cerminan dari praktik demokrasi yang tumbuh subur. Demokrasi di Indonesia memungkinkan seluruh perbedaan itu untuk diakui, dihormati, dan dirayakan secara bersama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dengan menjadikan musyawarah dan penghormatan terhadap hak-hak budaya sebagai napas kehidupan berbangsa, identitas nasional yang majemuk justru menjadi fondasi yang memperkuat partisipasi publik, toleransi, dan semangat gotong royong nilai-nilai inti yang membuat demokrasi Indonesia terus hidup hingga kini (Faslah, 2024).

Demokrasi juga dapat dipahami memiliki dua dimensi utama, yaitu sebagai sistem atau bentuk pemerintahan negara dan sebagai kumpulan nilai universal yang menjunjung tinggi martabat serta hak-hak kemanusiaan. Dalam konteks sebagai sistem negara, demokrasi tidak sepenuhnya sama dengan Islam karena Islam tidak secara khusus menentukan bentuk maupun sistem pemerintahan tertentu. Islam lebih menekankan pada ajaran agama, pedoman hidup, serta aturan dalam kehidupan bermasyarakat yang mengatur hubungan manusia dengan sesama maupun dengan Tuhan. Oleh karena itu, Islam lebih berfokus pada nilai dan prinsip kehidupan dibandingkan pada penetapan bentuk negara secara spesifik (Soleh, 2005).

Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Perjalanan demokrasi Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa periode penting. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer di mana kabinet bertanggung jawab kepada parlemen sehingga kekuasaan legislatif sangat dominan. Demokrasi parlementer memberikan kebebasan bagi partai politik untuk berkembang dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun, banyaknya partai politik menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet sehingga stabilitas politik menjadi terganggu. Kondisi tersebut membuat pembangunan nasional tidak berjalan optimal karena pemerintah sulit menjalankan program jangka panjang secara konsisten (Gunawan & Kuncoro, 2005).

Pada tahun 1959, Presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam sistem ini, kekuasaan presiden menjadi lebih dominan dibandingkan lembaga lainnya. Demokrasi terpimpin bertujuan menciptakan stabilitas politik dan menjaga persatuan nasional. Meskipun demikian, demokrasi terpimpin dianggap mengurangi kebebasan politik masyarakat karena proses pengambilan keputusan lebih terpusat pada pemerintah. Kebebasan pers dan oposisi politik juga mengalami pembatasan sehingga praktik demokrasi menjadi kurang sehat (Nabila et al., 2020). Pada masa Orde Baru, pemerintah menerapkan demokrasi Pancasila dengan fokus utama pada stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi. Pemerintah berhasil

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur nasional. Namun, demokrasi pada masa ini cenderung bersifat sentralistik dan otoriter. Kebebasan pers dibatasi, oposisi politik ditekan, dan pemilu lebih menguntungkan partai penguasa. Selain itu, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme berkembang luas sehingga memunculkan ketidakpuasan masyarakat yang akhirnya melahirkan reformasi tahun 1998 (Putra, 2024).

Era reformasi membawa perubahan besar dalam sistem demokrasi Indonesia. Reformasi menghadirkan kebebasan pers, pemilihan umum yang lebih demokratis, otonomi daerah, dan pembatasan masa jabatan presiden. Masyarakat memiliki kebebasan lebih besar dalam menyampaikan aspirasi politik dan mengawasi pemerintah. Perkembangan demokrasi Indonesia pasca reformasi menunjukkan peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan kehidupan politik nasional. Pemilihan umum legislatif merupakan bentuk partisipasi politik sebagai pelaksanaan dari kedaulatan rakyat, di mana rakyat menjadi pelaku yang paling menentukan bagi proses politik di suatu wilayah dengan memberikan suara secara langsung. Hak-hak rakyat harus dijunjung tinggi dan dilindungi dalam setiap proses demokrasi. Akan tetapi, demokrasi Indonesia juga mengalami tantangan berupa menurunnya kualitas demokrasi akibat munculnya oligarki politik, politik identitas, dan polarisasi sosial di masyarakat (Nugroho & Umam, 2021).

Tantangan Demokrasi Indonesia

Politik Uang

Politik uang masih menjadi tantangan utama dalam demokrasi Indonesia. Banyak kandidat menggunakan uang untuk memperoleh dukungan masyarakat dalam pemilu. Praktik tersebut menyebabkan demokrasi tidak berjalan secara jujur dan adil karena pilihan masyarakat dipengaruhi oleh imbalan materi. Pengaruh money politic dalam pemilihan anggota legislatif sangat signifikan terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia, karena praktik ini tidak hanya merusak integritas pemilu tetapi juga menghasilkan para pemimpin yang tidak berkualitas. Politik uang juga menyebabkan biaya politik menjadi tinggi sehingga pejabat yang terpilih cenderung melakukan korupsi untuk mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan selama kampanye. Politik uang yang marak dalam setiap pemilu menjadi ancaman serius bagi integritas demokrasi karena mampu mempengaruhi pilihan masyarakat secara tidak rasional (Nabila et al., 2020).

Korupsi Politik

Korupsi merupakan masalah serius dalam sistem demokrasi Indonesia. Banyak pejabat publik yang terlibat kasus korupsi sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Korupsi juga menghambat pembangunan nasional dan memperbesar ketimpangan sosial di masyarakat. Pendanaan politik memiliki korelasi kuat antara politik, uang, dan korupsi dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Sistem pendanaan politik yang tidak transparan menciptakan lingkaran setan di mana kandidat yang terpilih melalui pembiayaan besar cenderung menyalahgunakan kekuasaan untuk mengembalikan modal politiknya (Putra, 2024). Korupsi politik dapat merusak legitimasi pemerintahan demokratis karena

masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak lagi bekerja untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Politik Identitas dan Polarisasi Sosial

Perkembangan media sosial menyebabkan meningkatnya penggunaan politik identitas dalam kontestasi politik. Politik identitas sering memanfaatkan isu agama, suku, atau kelompok tertentu untuk memperoleh dukungan politik. Kontrol sosial melalui media sosial memiliki dampak ganda, di satu sisi membantu mengawasi jalannya pemerintahan, tetapi di sisi lain juga dapat memicu polarisasi akibat penyebaran informasi yang tidak terverifikasi (Hidayat, 2018). Fenomena tersebut dapat memicu polarisasi sosial dan mengancam persatuan bangsa apabila tidak dikelola dengan baik. Politik identitas menyebabkan masyarakat lebih mudah terpecah akibat perbedaan pilihan politik. Generasi muda perlu diperhatikan dalam hal pemahaman konten di media sosial dan media online. Mereka harus mengembangkan keterampilan analitis, kritis, dan literasi media untuk membedakan informasi yang akurat dari yang tidak akurat (Putri et al., 2026)

Rendahnya Pendidikan Politik

Sebagian masyarakat Indonesia masih memiliki tingkat pendidikan politik yang rendah sehingga mudah dipengaruhi oleh propaganda politik dan informasi palsu. Rendahnya literasi politik menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik yang rasional. Pendidikan politik berdasarkan Pancasila sangat penting dalam menghasilkan *zoon politicon* (makhluk politik) Indonesia yang berkarakter Pancasila. Pancasila dapat dipakai sebagai pedoman pendidikan politik dalam mengatasi ujaran kebencian di media sosial, karena sebagai ideologi mengandung makna di dalamnya sebagai panduan moral dan etika berdemokrasi. Pendidikan demokrasi menjadi sangat penting untuk membentuk masyarakat yang kritis, aktif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik (Bashori, 2018).

Upaya Penguatan Demokrasi Indonesia

Permasalahan demokrasi dapat diminimalkan melalui pemerintahan yang transparan, adil, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pendidikan politik dan literasi masyarakat juga perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih kritis dalam memahami informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh janji politik yang sederhana namun kurang realistis. Selain itu, partisipasi publik dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat harus diperkuat untuk mengurangi rasa ketidakpuasan dan keterasingan terhadap sistem politik. Dengan demikian, stabilitas demokrasi dan persatuan masyarakat dapat tetap terjaga (Zaman, 2023). Untuk memperkuat demokrasi Indonesia, diperlukan berbagai langkah strategis yang melibatkan pemerintah dan masyarakat.

Pertama, meningkatkan pendidikan politik dan pendidikan demokrasi kepada masyarakat agar warga negara memiliki pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban politiknya. Pendidikan demokrasi dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media massa. Pendidikan politik partisipatif

adalah instrumen krusial dalam demokrasi untuk mengubah masyarakat dari sekadar objek politik (pemilih pasif) menjadi subjek politik yang aktif dan kritis. Demokrasi Pancasila bukan sekadar mekanisme pemungutan suara, melainkan sistem demokrasi yang berlandaskan musyawarah mufakat dan keadilan sosial. *Civil society* memiliki peran strategis dalam membangun partisipasi politik dan gerakan sosial yang berkualitas (Fariz, 2021).

Kedua, memperkuat penegakan hukum terhadap praktik korupsi dan politik uang. Penegakan hukum yang tegas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menciptakan sistem politik yang lebih bersih. Diperlukan reformasi sistem pendanaan partai politik dan kampanye untuk memutus mata rantai antara uang dan kekuasaan (Putra, 2024). Ketiga, memperkuat independensi lembaga demokrasi seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan lembaga peradilan agar mampu menjalankan tugas secara profesional tanpa intervensi politik. Peran KPU dalam pemilihan anggota legislatif sangat krusial untuk memastikan pelaksanaan demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas (Nugroho & Umam, 2021).

Keempat, meningkatkan literasi digital masyarakat untuk menghadapi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Literasi digital penting agar masyarakat mampu menyaring informasi secara kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh isu politik identitas. Dengan langkah-langkah literasi media yang sistematis, generasi muda akan menjadi agen perubahan yang cerdas dan bertanggung jawab dalam menjaga kualitas demokrasi (Zaman, 2023). Kelima, memperkuat budaya demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, musyawarah, dan gotong royong. Demokrasi yang kuat tidak hanya bergantung pada sistem politik, tetapi juga pada karakter masyarakat yang menghargai keberagaman dan persatuan bangsa. Desentralisasi, globalisasi, dan demokrasi lokal perlu dikelola secara seimbang agar otonomi daerah tidak justru melahirkan politik identitas sempit yang mengancam persatuan nasional (Gunawan & Kuncoro, 2005).

Dengan berbagai upaya tersebut, penguatan demokrasi di Indonesia dapat berjalan secara lebih sehat, adil, dan berkelanjutan. Penegakan hukum yang tegas, independensi lembaga demokrasi, peningkatan literasi digital, serta penguatan nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas kehidupan demokrasi di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga negara, dan seluruh masyarakat untuk menciptakan sistem demokrasi yang bersih, berintegritas, serta mampu menjaga persatuan bangsa demi terwujudnya kehidupan bernegara yang aman, sejahtera, dan demokratis.

Kesimpulan dan Saran

Demokrasi Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan suatu sistem demokrasi tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pemilu atau kebebasan politik semata, tetapi juga oleh kualitas kesadaran masyarakat, integritas lembaga negara, dan kuatnya nilai-nilai kebangsaan yang menjadi dasar kehidupan bernegara. Perjalanan demokrasi Indonesia dari masa ke masa membuktikan bahwa demokrasi selalu mengalami

dinamika sesuai kondisi sosial, politik, dan perkembangan zaman. Di era reformasi, demokrasi Indonesia mengalami kemajuan dalam aspek kebebasan dan partisipasi publik, tetapi di sisi lain juga menghadapi ancaman berupa korupsi politik, politik identitas, penyebaran hoaks, dan rendahnya literasi politik masyarakat.

Oleh karena itu, penguatan demokrasi perlu diarahkan tidak hanya pada perbaikan sistem politik, tetapi juga pada pembangunan karakter masyarakat yang demokratis, kritis, toleran, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai Pancasila harus tetap menjadi fondasi utama dalam kehidupan demokrasi Indonesia agar keberagaman tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga demokrasi, dan masyarakat, demokrasi Indonesia dapat berkembang menjadi sistem yang lebih matang, berkeadilan, dan mampu menjaga stabilitas nasional di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi digital.

Daftar Pustaka

- Agus, A. A. (2016). Relevansi Pancasila sebagai ideologi terbuka di era reformasi. *Jurnal Office*, 2(2), 229–238.
- Bashori, K. (2018). Pendidikan politik di era disrupsi. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, 2(2), 287–310.
- Fariz, M. (2021). Civil Society Dan Demokrasi Studi Peran Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam Penguatan Pemilu dan Demokrasi di Indonesia. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas ...
- Faslah, R. (2024). Identitas Nasional, geostrategi, dan geopolitik: Membangun keberlanjutan dan kedaulatan. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <https://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Gunawan, J., & Kuncoro, M. (2005). *Desentralisasi, Globalisasi, Dan Demokrasi Lokal (Decentralisation, Globalisation and Local Democracy)*, Jakarta, LP3ES.
- Huda, N. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Kencana.
- Nabila, N., Prananingtyas, P., & Azhar, M. (2020). Pengaruh money politic dalam pemilihan anggota legislatif terhadap keberlangsungan demokrasi di indonesia. *Notarius*, 13(1), 138–153.
- Nugroho, M. A., & Umam, K. (2021). Peran Komisi Pemilihan Umum dalam pemilihan anggota legislatif perspektif fiqh al-siyāsah al-dustūriyyah. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 3(3).
- Putra, A. (2024). *PENDANAAN POLITIK:(Korelasi Kuat Antara Politik, Uang, dan Korupsi dalam Konteks Pemilihan Umum di Indonesia)*.
- Putri, M. F. J. L., Sitompul, P. H. S., Th, M., Sasmita, S. K., Devi, L. S., Subowo, A., Rahayu, Y. M., & Bisri, M. H. (2026). *Politik Kewarganegaraan*. Basya Media Utama.
- Soleh, A. K. (2005). Islam dan demokrasi. *El-Jadid: Jurnal Ilmu Pengetahuan Islam*, 3(1), 111–126. <https://repository.uin-malang.ac.id/15166/>
- Zaman, S. (2023). Edukasi literasi politik dan media untuk generasi muda: kesiapan menghadapi tahun politik 2024. <https://repository.uin-malang.ac.id/14994/>